

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN
AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP
AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN
PRINGSEWU**

(Skripsi)

Oleh

RIYAN ERIKO ZAMA



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

EFFECT OF FINANCIAL STATEMENTS PRESENTATIONS OF THE FINANCIAL STATEMENT AND ACCESSIBILITY OF REGIONAL FINANCIAL REPORTS TO FINANCIAL ACCOUNTABILITY PRINGSEWU

By

**Riyan Eriko Zama
1011031111**

The area of financial accountability is financial management process from planning, implementation, reporting, accountability, and oversight is absolutely reportable and accountable to the public. The government is expected to present a financial statement that shows the financial information that is true then the financial statements may be published in the open where the user can know the potential of financial reporting information that is displayed.

The population in this study are members SKPD residing in the district Pringsewu. The data used in this study are primary data. Data collection techniques with engineering survey by distributing questionnaires. The analysis used is multiple regression analysis, F test and t test. In this study the authors wanted to know, 1) the effect of financial statement presentation area to the area of financial accountability, 2) influence the accessibility of the financial statements of the financial accountability of local areas.

The results show that: 1) Presentation of the financial statements of the area significantly influence local financial accountability, 2) Accessibility financial statement areas significantly influence financial accountability area. It is recommended for all government agencies Pringsewu district in order to increase the accessibility of financial statements and financial statements that the accountability of financial management can be improved.

Keywords: financial statements, accessibility, accountability

ABSTRAK

PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN PRINGSEWU

Oleh

**Riyan Eriko Zama
1011031111**

Akuntabilitas keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu menyajikan laporan keuangan yang menunjukkan informasi keuangan yang sebenar-benarnya yang kemudian laporan keuangan yang disajikan tersebut dapat dipublikasikan secara terbuka dimana para pengguna potensi dapat mengetahui informasi laporan keuangan yang ditampilkan.

Populasi dalam penelitian ini adalah para anggota SKPD yang berada di wilayah kabupaten Pringsewu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data dengan teknik survei dengan menyebarkan kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda, uji f dan uji t. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui, 1) pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah, 2) pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa: 1) Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah, 2) Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Untuk itu disarankan bagi seluruh instansi pemerintah Kabupaten Pringsewu agar dapat meningkatkan penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan agar akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat terus ditingkatkan.

Kata kunci : laporan keuangan, aksesibilitas, akuntabilitas

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN
AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP
AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN
PRINGSEWU**

Oleh

Riyan Eriko Zama

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN PRINGSEWU**

Nama Mahasiswa : **Riyan Eriko Zama**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1011031111**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



1. Komisi Pembimbing

Yuliansyah, SE, M.S.A., Ph.D Akt.
NIP. 197307231990031002

Pigo Nauli, S.E., M.Sc.
NIP 198206232008121001

2. Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 19620612 199010 2001

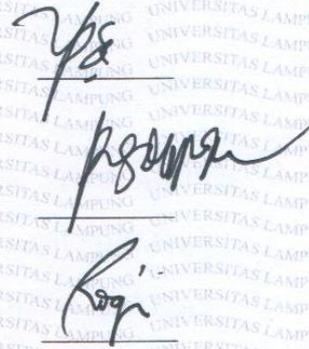
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Yuliansyah, SE, M.S.A., Ph.D Akt.

Sekretaris : Pigo Nauli, S.E., M.Sc

Penguji Utama : Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si
NIP 19610904 198703 1011



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 November 2016

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riyan Eriko Zama

NPM : 1011031111

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN PRINGSEWU”** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil karya orang lain. Semua tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya hasil penjiplakkan atau dibuat orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 29 November 2016



Riyan Eriko Zama

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Riyan Eriko Zama, dilahirkan di Liwa tanggal 26 Maret 1992 sebagai putra kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Bastari ZM dan Ibu Pilu Minasari.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Melati Puspa, Bandar Lampung tahun 1998.

Dilanjutkan dengan pendidikan dasar di SD Al-Azhar 1 Kedaton, Bandar Lampung dan lulus tahun 2004. Selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 29 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2007, kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat atas di SMA Negeri 9 Bandar Lampung hingga lulus pada tahun 2010.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2010 melalui jalur Ujian Mandiri.

PERSEMBAHAN

*Dengan rasa syukur dan ketundukanku kepada Allah SWT,
Kupersembahkan karya ini sebagai tanda bukti, cinta dan
sayangku kepada : Papa Bastari ZM dan Mama Pilu
Minasari tercinta, kakakku Yoan Enrile Zama dan adikku
Yeyen Eriska Zama yang kusayangi*

*Terima kasih atas segala doa, kepercayaan yang kalian
titipkan dan dukungan yang tak henti-hentinya
tercurahkan sebagai bentuk kasih sayang yang tiada tara*

*Karena tanpa kalian aku tak akan pernah sedekat ini
dengan mimpi-mimpiku.
Terimakasih telah menjadi pendukung dan penyemangatku.*

*Almamater tercinta jurusan
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Lampung.*

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka sendiri yang akan mengubahnya”

(QS: Al-Ra'du:12)

“Siapa yang bersungguh-sungguh, akan berhasil”

(Ahmad Faudi)

“Tujuan akan cepat terlaksana jika kita tidak merubah-rubah rencana”

(Pepatah Cinta)

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan semua ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN PRINGSEWU”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah S.E., M.Si., Akt. Sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Yuliansyah, SE, M.S.A.,Ph.D Akt Sebagai dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan, masukan, arahan dan nasihat yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi.

4. Bapak Pigo Nauli, S.E.,M.Sc. Sebagai dosen Pembimbing Kedua, yang telah memberikan bimbingan, arahan, bantuan dan saran-sarannya selama proses penyelesaian skripsi.
5. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. Selaku dosen penguji, atas saran dan masukan yang telah diberikan untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Susi, SE, MBA, Ph.D., Akt. sebagai dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan proses belajar.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan di Jurusan Akuntansi. Khususnya untuk staff karyawan di Jurusan Akuntansi Pak Sobari, Mba Tina, Mpok, Mas Yana, Mas Leman, Mas Yogi, Mas Ruli yang telah banyak membantu selama proses pengerjaan skripsi.
8. Orang tuaku tercinta Papa Bastari ZM dan Mama Pilu Minasari yang senantiasa memberikan nasihat, doa, dan dukungan kepada penulis. Terima kasih atas kasih sayang dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini.
9. Kakakku Yoan Enrile Zama dan adikku Yeyen Eriska Zama yang selalu memberikan semangat dan dukungan. Terimakasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis.
10. Kakak iparku selaku istri dari kakakku Fitri Faula beserta keluarga besar nya yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini
11. Para Pimpinan dan Pegawai SKPD kabupaten Pringsewu yang telah memberikan izin penelitian dan membantu dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.

12. Teman-teman AKT 2010, Ario, Bram, Dicky, Fajar, Yuda, Egi, Wahyu, Rijal, Ryan, Satria, Surya, Annas, Teja, Irfan, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas bantuannya selama ini.
13. Teman-teman sisa seperjuangan, Apri, Taufik, Aderio, Didik, Iqbal, Firas, Indra, Edwin, Fadli, Teruskan dan selesaikan perjuanganmu kawan.
14. Kawan-kawan kantin Ayuk dan kantin Emak, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan.

Penulis berdoa semoga segala bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Amin. Demikianlah, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baru kepada setiap orang yang membacanya.

Bandar Lampung, 29 November 2016

Riyan Eriko Zama

DAFTAR ISI

	HALAMAN
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	10
2.1.2 Penggunaan Informasi Keuangan	11
2.1.3 Penyajian Laporan Keuangan.....	14
2.1.4 Aksesibilitas Laporan Keuangan.....	16
2.1.5 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan.....	18
2.2 Penelitian Terdahulu.....	20
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	22
2.4 Hipotesis.....	24
2.4.1 Hubungan Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan..... Akuntabilitas Keuangan Daerah.....	24
2.4.2 Hubungan aksesibilitas laporan keuangan daerah dan Akuntabilitas Keuangan Daerah.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Lokasi Penelitian	27
3.2 Populasi dan Penentuan Sampel	27
3.3 Jenis dan Sumber Data	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data	29
3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	29
3.5.1 Variabel Penelitian	29
3.5.2 Definisi Operasional Variabel	30
3.5.2.1 Penyajian Laporan Keuangan Daerah	30
3.5.2.2 Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	32
3.5.2.3 Akuntabilitas Keuangan Daerah.....	33
3.6 Analisis Data.....	35
3.6.1 Analisa Deskriptif	35
3.6.2 Uji Kualitas Data.....	36
3.6.2.1 Uji Validitas.....	36
3.6.2.2 Uji Reliabilitas	36
3.6.3 Pengujian Hipotesis.....	37
3.6.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	37
3.6.3.2 Uji Statistik F.....	38
3.6.3.3 Uji Statistik t.....	38
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Deskripsi Data	39
4.2 Statistik Deskriptif	43

4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas	44
4.3.1 Uji Validitas.....	44
4.3.1.1 Penyajian Laporan Keuangan Daerah	45
4.3.1.2 Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	46
4.3.1.3 Akuntabilitas Keuangan Daerah.....	47
4.3.2 Uji Reliabilitas.....	48
4.4 Pengujian Hipotesis	49
4.4.1 Uji Regresi Linear Ganda.....	50
4.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	52
4.4.3 Uji Statistik F.....	53
4.4.4 Uji Statistik t.....	54
4.4.4.1 Variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1).....	55
4.4.4.2 Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah.....	
(X2).....	56
4.5 Pembahasan.....	56
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	59
5.1 Simpulan.....	59
5.2 Saran	60

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel 2.1 Mengemukakan Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	20
Tabel 4.1 Hasil Analisis Penyebaran dan Pengembalian Kuisoner.....	40
Tabel 4.2 Hasil Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	40
Tabel 4.3 Hasil Jumlah Responden Berdasarkan Usia.....	41
Tabel 4.4 Hasil Jumlah Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.....	41
Tabel 4.5 Hasil Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	42
Tabel 4.6 Hasil Jumlah Responden Berdasarkan Jabatan.....	43
Tabel 4.7 Statistik Deskriptif.....	44
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)...	45
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2).....	46
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y).....	47
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas.....	48
Tabel 4.12 <i>Variable Entered/Removed</i>	49
Tabel 4.13 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	50
Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	52
Tabel 4.15 Hasil Uji F.....	53
Tabel 4.16 Hasil Uji t.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

	HALAMAN
Lampiran 1 : Kuisoner.....	L1
Lampiran 2 : Statistik Deskriptif.....	L2
Lampiran 3 : Hasil Jawaban Responden.....	L3
Lampiran 4 : Frekuensi Jawaban Responden.....	L4
Lampiran 5 : Uji Kualitas Data.....	L5
Lampiran 6 : Uji Regresi Linear Berganda.....	L6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan sektor publik yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini mengenai kuatnya tuntutan penggunaan informasi keuangan atas lembaga-lembaga publik, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tuntutan tersebut meliputi perlu dilakukannya sebuah transparansi kepada publik serta pemerintah juga perlu melakukan pemberian informasi kepada publik yang didasarkan atas pemenuhan hak-hak publik. Kurangnya pemerintah dalam memberikan informasi keuangan untuk sekarang ini menyebabkan pertanggungjawaban pemerintah daerah berupa laporan keuangan belum sepenuhnya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini karena disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang tidak aksesibel dan kurang lengkap itu secara mudah menurunkan kualitas dari akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Penggunaan informasi laporan keuangan daerah berkaitan dengan penilaian para pengguna laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas dan transparansi setiap laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah. Penggunaan informasi keuangan daerah penting dilakukan karena para pengguna dapat mengetahui kondisi keuangan suatu daerah dengan melakukan berbagai analisis. Dengan mengetahui kondisi keuangan daerah, maka kecurangan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah dapat diminimalisir, setiap kegiatan pengelolaan keuangan daerah dapat terpantau dan diharapkan dapat disajikan sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam laporan keuangan daerah. Agar akuntabilitas publik terjamin, diperlukan suatu penyajian informasi keuangan yang utuh dalam laporan keuangan. Pemerintah sebagai pengelola dana masyarakat harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan (Bastian dalam Sande, 2013). Sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, organisasi sektor publik harus mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangannya. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas

(Nordiawan dalam Sande, 2013), karena semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan aksesibilitas laporan keuangan tersebut.

Aksesibilitas (*accessibility*) laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan.

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami (Mulyana, 2006). Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2002). Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, *website* (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet dalam Mulyana, 2006).

Pernyataan No 1 SAP tahun 2005, menyatakan bahwa “Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna”. Yang dimaksud dengan pengguna pada pengertian diatas adalah masyarakat, legislatif, lembaga, pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman serta pemerintah. Dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah

harus memenuhi unsur-unsur karakteristik kualitatif laporan keuangan sesuai dengan PP No. 24 tahun 2005 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat di pahami. Penyusunan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam PP No. 24 tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami

Tujuan penyajian laporan keuangan daerah adalah memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri (Sujana, 2002 dalam Rohman, 2009). Sedangkan para pengguna laporan keuangan mempunyai bermacam-macam kebutuhan dalam laporan keuangan itu sendiri. Oleh karena itu laporan keuangan yang disusun pemerintah harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara lengkap sesuai dengan peraturan yang ada dan syarat-syarat agar laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi harapan pengguna (*Wilson dan Kattelus 2002 dalam Rohman 2009*). Menurut (*Mardiasmo, 2002*) bagi organisasi pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah memberikan informasi yang digunakan dalam

pembuatan keputusan ekonomi, social, politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan. Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan penggunaan informasi keuangan, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, akan tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikan ke DPRD saja, tetapi juga menyediakan fasilitas kepada masyarakat secara luas agar laporan keuangan dapat diperoleh dengan mudah. Penggunaan informasi keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah yang dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggung-jawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Pemerintah harus dapat meningkatkan penggunaan informasi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Mulyana, 2006).

Penyusunan laporan keuangan pemerintah harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penerapan SAP membawa konsekuensi juga pada perubahan sistem akuntansi. Sistem akuntansi memang tidak diatur dalam SAP tetapi entitas harus merancang sistem akuntansinya sendiri yang dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai SAP. Perubahan-perubahan yang ada pada sistem akuntansi itu secara wajar berpengaruh pada undang-undang yang mengatur mengenai akuntabilitas publik. Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pertanggungjawaban itu tidak hanya wajib disampaikan kepada lembaga legislatif, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pemberi mandat atau kekuasaan kepada pemerintah.

Namun, permasalahan yang dihadapi sekarang adalah publikasi laporan keuangan oleh pemerintah nampaknya belum menjadi hal yang umum. Peran laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) pada tahun 2013 menyatakan bahwa LKPD dari pemerintah daerah yang wajib menyusun LKPD Tahun 2013 memperoleh opini WTP hanya sebesar 29,96%, Hal ini disebabkan karena transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah tidak sepenuhnya terbuka dan menghambat kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Kabupaten Pringsewu hanya meraih predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Lampung. Predikat tersebut diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Pringsewu tahun anggaran 2014. (*Sumber : HarianLampung.com* 28 mei 2015). Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka judul penelitian yang di pilih ialah **“PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTANBILITAS KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN PRINGSEWU”**

1.2. Rumusan Masalah

Seiring dengan perkembangan sektor publik yang terjadi di Indonesia, berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik perumusan masalahnya yaitu sebagai berikut :

- (1) Apakah penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah Kab Pringsewu ?
- (2) Apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah Kab Pringsewu ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ditemukan, tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut

- (1) untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa besar pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dengan akuntabilitas keuangan daerah Kab Pringsewu.
- (2) untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa besar pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah dengan akuntabilitas keuangan Kab Pringsewu.

1.4. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Pemda Kab Pringsewu sebagai pengguna utama laporan keuangan mendorong agar lebih menyadari pentingnya laporan keuangan sebagai alat untuk mengawasi pengelolaan sumber daya dan menilai kinerja keuangan secara lebih baik.
2. Bagi masyarakat sebagai *stakeholder* eksternal, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mendeteksi tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan mendorong agar lebih berpartisipasi dalam mengawasi serta mendorong peningkatan kinerja keuangan daerah kab Pringsewu.
3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur dalam perkembangan ilmu akuntansi berkaitan dengan pengelolaan laporan keuangan daerah Kab Pringsewu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency theory*) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang member wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut "*nexus of contract*" (Subaweh, 2008).

Teori keagenan (*Agency Theory*) muncul karena keberadaan hubungan antara agen dan prinsipal. Agen dikontrak untuk melakukan tugas tertentu bagi prinsipal serta mempunyai tanggung jawab atas tugas yang diberikan prinsipal. Prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan kepada agen atas jasa yang telah diberikan oleh agen. Keberadaan perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik keagenan. Prinsipal dan agen sama-sama menginginkan keuntungan

sebesar-besarnya. Prinsipal dan agen juga sama-sama berusaha untuk menghindari risiko (Belkaouli, 2001).

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal. Pihak prinsipal tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen dan kinerja tersebut salah satunya dapat dilihat dari laporan keuangan dan pelayanan yang baik, sedangkan bagaimana laporan keuangan dan pelayanan yang baik tergantung dari strategi yang diterapkan oleh pihak pemerintah. Apabila kinerja pemerintahan baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah. Kesimpulannya pemilihan strategi akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat sebagai pihak prinsipal terhadap pemerintah sebagai agen.

2.1.2. Penggunaan Informasi Keuangan

Untuk memuaskan pengguna informasi, sangat perlu dilakukan upaya untuk menggali apa saja informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan daerah. Menurut (Mardiasmo, 2002) bagi organisasi pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah:

1. Memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*).
2. Memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Secara rinci tujuannya yaitu:

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya.
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan organisasional.
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik. Publik mempunyai hak untuk mengetahui laporan keuangan pemerintah. Adanya tingkat kepuasan yang berbeda-beda untuk tiap pengguna informasi keuangan, menyebabkan kebutuhan informasi yang berbeda pula yang dapat menyebabkan timbulnya konflik kepentingan. Namun kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan pemerintah dapat diringkas sebagai berikut (Mardiasmo, 2002):

1. Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan publik yang diberikan.
2. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan penggunaan yang diberikan.
3. Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat resiko, likuiditas, dan solvabilitas.
4. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, dan mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan Negara.
5. Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis.

Penggunaan informasi yang difokuskan pada penelitian ini adalah seberapa besar kebutuhan informasi dari pihak-pihak di luar manajemen internal pmda terpengaruh oleh penyajian laporan keuangan daerah itu dan atas keterbukaan akses yang diberikan.

2.1.3 Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2002).

Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, menurut (*Diamond*, 2002), pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1, alinea 49, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas dana.

Tujuan laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 adalah digunakan sebagai berikut :

- (a) akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- (b) manajemen, membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Menurut (Nordiawan, 2010), tujuan penyajian laporan keuangan terdiri dari : menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, dan menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan.

Informasi keuangan di dalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- (a) meningkatkan akuntabilitas untuk para manajer (kepala daerah dan para pejabat pemda) ketika mereka bertanggung jawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang mereka kelola.
- (b) meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas.
- (c) memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban.
- d) Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan (*Diamond, 2002*).

2.1.4 Aksesibilitas Laporan Keuangan

Pengertian aksesibilitas (*accessibility*) dalam kamus besar bahasa indonesia adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal dapat dikaitkan. Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan (*Mulyana,2006*).

Laporan keuangan harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya (*Henly*, 1992, dalam Rohman, 2009).

(Mardiasmo, 2002), laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (*accountability* dan *stewardship*). Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan *website* (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (*Shende* dan *Bennet*, 2004). Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikannya ke DPRD saja, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah.

2.1.5 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN)

No.589/IX/6/Y/99, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak/berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pemberlakuan undang-undang otonomi daerah harus dapat meningkatkan daya inovatif dari pemerintah daerah untuk dapat memberikan laporan pertanggung jawaban mengenai pengelolaan keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas kepada DPRD maupun masyarakat luas.

(*Osborne, 1992 dalam Mardiasmo, 2002*) menyatakan bahwa Akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain, apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, kepada siapa pertanggungjawaban diserahkan, siapa yang bertanggung jawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai, dan lain sebagainya. Konsep pelayanan ini dalam akuntabilitas belum memadai, maka harus diikuti dengan jiwa *eterpreneurship* (kewirausahaan) pada pihak-pihak yang melaksanakan akuntabilitas.

(Katz, 2004) menyatakan bahwa transparansi merupakan proses demokrasi yang esensial di mana setiap warga negara dapat melihat secara terbuka dan jelas atas aktivitas dari pemerintah mereka daripada membiarkan aktivitas tersebut dirahasiakan. Jiwa dari sistem ini adalah kemampuan dari setiap warga negara untuk memperoleh informasi melalui akuntabilitas pejabat pemerintah atas kegiatan yang mereka lakukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dinyatakan bahwa komponen yang harus terdapat dalam suatu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 58 ayat 1 dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengadilan intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.

Akuntabilitas dan keadilan merupakan atribut yang terpisah. Akan tetapi, dua istilah yang pertama adalah tidak independen, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi (Shende dan Bennet, 2004). Akuntabilitas keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang

dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

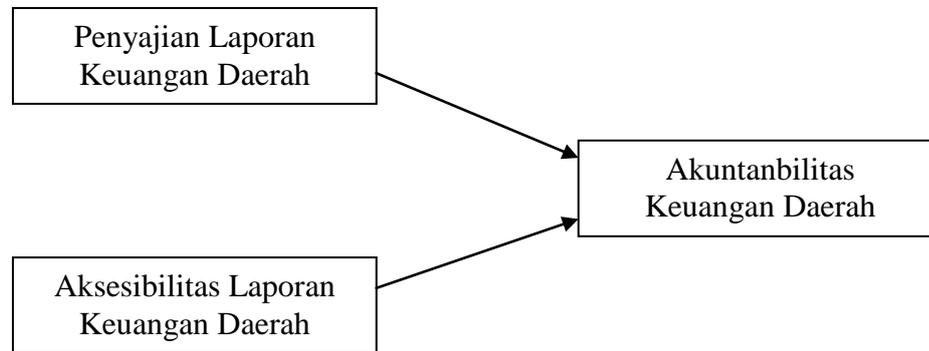
2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Mengemukakan Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO	NAMA	UNIVERSITAS	JUDUL	HASIL PENELITIAN
1	(Bandariy, 2011)	UNIVERSITAS DIPENOHORO SEMARANG	PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP INFORMASI KEUANGAN PADA BANYUMAS	Hasil dari pengujian hipotesis di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan secara signifikan berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan oleh para pengguna informasi. Sementara aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan Secara simultan penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan
2	(Wahida, 2015)	UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASAR	PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN KONAWA UTARA	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan secara individu maupun secara bersama-sama atau serempak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan . Berdasarkan jawaban responden bahwa masih terdapat kelemahan dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan pada kabupaten Konawe Utara. Dimana menurut masyarakat proses penyampaian, penyebarluasan dan akses masyarakat terhadap laporan keuangan kabupaten KonaweUtara belum terlaksana secara baik.

3	(J Hehanussa, 2015)	UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU	PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA AMBON	Hasil pengujian secara empiris membuktikan bahwa Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penyajian laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, memungkinkan control dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan secara baik. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik sehingga efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah tetap terlaksana dengan baik serta mampu meminimalisasi praktek korupsi oleh para aparatur sehingga <i>good governance</i> dan <i>clean government</i> akan terwujud di pemerintahan Kota Ambon
4	(Pongoliu, 2014)	UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN (Studi Pada DPPKAD Kabupaten Bone Bolango)	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Semakin baik penyajian laporan keuangan dengan memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel terikat. Bagan dalam kerangka pikir diatas menjelaskan alur dalam pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan daerah kabupaten pringsewu.

Untuk bagan pertama, dijelaskan hubungan antara penyajian laporan keuangan dan akuntabilitas keuangan dimana tujuan penyajian laporan keuangan adalah memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri. Sedangkan para pengguna laporan keuangan mempunyai bermacam-macam kebutuhan dalam laporan keuangan itu sendiri. Oleh karena itu laporan keuangan yang disusun pemerintah harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara lengkap sesuai dengan peraturan yang ada dan syarat-syarat agar laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi harapan pengguna (Rohman, 2009).

Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa untuk menyajikan laporan keuangan daerah, pemerintah dituntut untuk mampu menyajikan laporan keuangan yang secara wajar dan diungkap secara lengkap agar laporan keuangan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terciptalah akuntabilitas suatu laporan keuangan sesuai harapan.

Untuk bagan kedua, dijelaskan hubungan antara aksesibilitas laporan keuangan dan akuntabilitas keuangan dimana, aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Rohman, 2009). Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006). Penyajian adalah aspek yang penting dari aksesibilitas. Dengan kata lain laporan keuangan minimalnya harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya.

Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa agar akuntabilitas suatu laporan keuangan yang baik, maka seseorang yang ingin memperoleh suatu informasi laporan keuangan paling tidak pemerintah memberikan kemudahan berupa fasilitas informasi yang dapat diperoleh dengan mudah, informasi yang dimuatkan dapat dimengerti dan menunjukkan informasi

keuangan yang sesuai dengan keadaan sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan informasi keuangan pemerintah daerah.

2.4 Hipotesis

2.4.1. Hubungan penyajian laporan keuangan daerah dan akuntabilitas keuangan daerah.

Penyajian laporan keuangan merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Pemerintah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordiawan, 2010). Berarti semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Mulyana (2006) menyatakan penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Bandary (2011) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan secara signifikan berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan oleh para pengguna informasi. Pongoliu (2014) menyatakan penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Berdasarkan atas dasar dukungan teori dan bukti empiris di atas, maka dapat dibangun hipotesis:

H1: Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah Kab Pringsewu.

2.4.2. Hubungan aksesibilitas laporan keuangan daerah dan akuntabilitas keuangan daerah.

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, *website* (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (*Shende dan Bennet* dalam Mulyana, 2006). Pemerintah harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan. Apalah artinya menyajikan laporan keuangan dengan baik tapi tidak memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan dengan baik. Mulyana (2006) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif secara signifikan terhadap upaya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Bandary (2011) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan oleh para pengguna informasi.

Wahdina (2015) menyatakan bahwa aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Namun masih ada kelemahan dimana menurut hasil penelitiannya proses penyampaian, penyebarluasan, dan akses masyarakat terhadap laporan keuangan belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan atas dasar dukungan teori dan bukti empiris di atas, maka dapat dibangun hipotesis:

H2: Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah Kab Pringsewu.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kabupaten Pringsewu, sebagai salah satu entitas pelaporan yang diwajibkan menyajikan laporan keuangan. Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung

3.2 Populasi dan Penentuan Sample

Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna internal dan eksternal laporan keuangan Daerah kabupaten Pringsewu, yang dalam hal ini populasi yang dituju oleh peneliti adalah SKPD yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Pringsewu dengan responden kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala seksi maupun staf dari masing-masing SKPD yang terlibat dalam proses-proses pengelolaan keuangan daerah. Penyampelan atas responden (pengguna laporan keuangan) menggunakan teknik *proporsionate stratified random sampling*; yakni, suatu teknik pemilihan sampel yang apabila populasinya tidak seragam (heterogen). yang terdiri dari beberapa kelompok dengan kategori yang berbeda.

Dalam menentukan jumlah besarnya sampel dari total populasi, maka digunakan rumus Slovin (Riduwan, 2005) seperti di bawah ini:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran Populasi

e = Nilai kritis/toleransi yang diinginkan

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek, yaitu jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden). Tanggapan yang diberikan oleh responden berupa respon tertulis melalui kuesioner yang diajukan oleh peneliti. Kuesioner, artinya dengan membagikan daftar pertanyaan yang berhubungan variabel yang diteliti yaitu karakteristik laporan keuangan, serta kriteria-kriteria yang berkaitan dengan akuntabilitas laporan keuangan. Kuesioner diberikan dengan mengantar langsung dan dititipkan kepada staf di kantor, dengan mengadakan perjanjian pengambilannya setelah waktu yang dijanjikan tiba.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Penyusunan penulisan ini, penulis mengambil cara dalam mendapatkan data dan informasi yang ada hubungannya dengan materi pembahasan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dan digunakan bersifat kuantitatif, terdiri atas data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan memberikan kuesioner kepada responden untuk memperoleh informasi tentang pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah pada kabupaten Pringsewu

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.5.1 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas keuangan daerah (Y). Yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah penyajian laporan keuangan daerah (X1) dan aksesibilitas laporan keuangan daerah (X2). Pengukuran variabel menggunakan skala *Likert* yaitu responden menyatakan tingkat setuju atau tidak setuju mengenai keberadaan

pernyataan mengenai perilaku, obyek, atau kejadian (Kuncoro, 2003). Jawaban akan diberi skor: Skor 1 = sangat tidak setuju, Skor 2 = tidak setuju, Skor 3 = ragu-ragu , Skor 4 = setuju, Skor 5 = sangat setuju.

3.5.2 Definisi Operasional Variabel

3.5.2.1 Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Penyajian Laporan Keuangan Daerah merupakan penyajian informasi keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Terdapat 4 indikator karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu;

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Dari indikator diatas, terdapat sub indikator yang terkandung dalam penyajian laporan keuangan daerah yang akan digunakan sebagai pertanyaan yang akan di ajukan kepada responden yang terdiri dari (Wahdina, 2015) :

- a). Laporan keuangan disusun secara lengkap.
- b). Laporan keuangan diselesaikan tepat waktu.
- c). Laporan keuangan memiliki informasi untuk mengoreksi keuangan masa lalu.
- d). Laporan keuangan menyediakan informasi yang dapat memprediksi masa depan.
- e). Informasi yang disajikan menggambarkan transaksi secara jujur.
- f). Laporan keuangan yang diperiksa kembali oleh pihak lain menunjukkan hasil yang tidak terlalu berbeda jauh.
- g). Informasi yang dimuatkan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.
- h). Laporan keuangan dijadikan sesuai tolak ukur untuk tahun berikutnya.
- i). Informasi yang dimuatkan dapat dipahami.

3.5.2.2 Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas laporan keuangan adalah kemampuan untuk memberikan akses bagi *stakeholder* untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi *stakeholder*. Terdapat 3 indikator yang mempengaruhi aksesibilitas laporan keuangan:

1. Terbuka di media massa

Laporan keuangan dipublikasikan secara terbuka melalui media massa sehingga pengguna laporan keuangan terutama pihak eksternal dapat melihat secara langsung dari media cetak.

2. Mudah diakses

Pihak eksternal dapat mengakses informasi laporan keuangan melalui internet (*website*).

3. Ketersediaan informasi

Informasi laporan keuangan yang dipublikasi secara lengkap disampaikan terhadap pengguna laporan keuangan yang membutuhkan.

Dari indikator diatas, terdapat sub indikator yang terkandung dalam aksestabilitas laporan keuangan daerah yang akan digunakan sebagai pertanyaan yang akan di ajukan kepada responden yang terdiri dari (Wahdina, 2015) :

- a). Dipublikasikan secara luas dimedia masa.
- b). Pengguna potensial dapat memperoleh informasi dengan mudah.
- c). Masyarakat dapat mengakses melalui internet.

3.5.2.3 Akuntabilitas Keuangan Daerah

Akuntabilitas Keuangan daerah (dependent variabel) merupakan proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD. (*Ellwood*, 1993 dalam Mahsun, 2006) menjelaskan bahwa Terdapat 4 indikator yang mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan petanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

Dari indikator diatas, terdapat sub indikator yang terkandung dalam akuntabilitas keuangan daerah yang akan digunakan sebagai pertanyaan yang akan di ajukan kepada responden yang terdiri dari (Wahdina, 2015) :

- a). Penyusunan APBD dengan kinerja.
- b). Penyampaian rancangan APBD terhadap DPRD.
- c). Pendapatan Daerah diserahkan tepat waktu dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d). Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai standar.
- e). Sistem informasi manajemen yang dapat dimonitor.
- f). Laporan Keuangan di periksa sebelum diserahkan oleh BPK.
- g). Laporan keuangan disampaikan kepada BPK untuk diperiksa melakukan audit.
- h). Hasil kinerja dapat digunakan sebagai evaluasi APBD.
- i). APBD dipertanggungjawabkan oleh otoritas yang lebih tinggi kepada masyarakat.

3.6 Analisis Data

3.6.1 Analisis Deskriptif

Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang telah dirumuskan sebelumnya dan untuk mendapatkan bukti empiris sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini. Data di peroleh dari hasil kuisisioner, kemudian dikuantitatifkan agar dapat dianalisis secara statistik.

3.6.2 Uji Kualitas Data

3.6.2.1 Uji Validitas

Pengujian ini dimaksudkan untuk dapat mempertanggungjawabkan ketelitian serta ketepatan kuisioner yang dibagikan kepada responden. Alat ukur yang valid berarti alat ukur tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan analisis faktor. Data yang dapat dilakukan analisis faktor bila nilai MSA (*Measure of Sampling Adequacy*) di atas 0,05 (5%) dan item yang dimasukkan dalam analisis faktor adalah item-item yang memiliki faktor *loading* di atas 0,40 (Chia, 1995).

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur handal atau tidaknya kuisioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Suatu kuisioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Dengan demikian, uji reabilitas dimaksudkan untuk mengetahui konsisten/tidaknya responden terhadap kuisioner-kuisioner penelitian. Uji reliabilitas dilakukan dengan rumus *Cronbach's Alpha*. Kriteria dalam pengujian reliabilitas berdasarkan nilai *Cronbach's Alpha*, menurut (Sekaran, 2003), secara umum apabila didapatkan nilai *Cronbach's Alpha* kurang dari 0,60 berarti buruk, sekitar 0,70 diterima dan lebih dari 0,80 adalah baik.

3.6.3 Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggambarkan suatu hubungan dimana satu atau lebih variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen). Oleh karena itu peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Dalam analisis regresi linier berganda, selain mengukur kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen juga menunjukkan arah pengaruh tersebut. *Statistical Package For Sosial Science* (SPSS) akan digunakan untuk membantu proses analisis regresi linear berganda. Pengujian-pengujian tersebut didasarkan pada persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:	Y	: Akuntabilitas Keuangan Daerah
	X1	: Penyajian Laporan Keuangan Daerah
	X2	: Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah
	a	: Konstanta
	b1	: koefisien regresi dari X1
	b2	: koefisien regresi dari X2
	e	: kesalahan residual (error turn)

3.6.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Analisis Koefisiensi Determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar

variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase.

3.6.3.2 Uji Statistik F

Uji F dilakukan bertujuan untuk menguji apakah hasil analisis regresi berganda modelnya sudah fix atau belum dan untuk dapat mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat secara keseluruhan atau secara simultan. Patokan yang digunakan dalam pengujian ini adalah membandingkan nilai sig yang diperoleh dengan derajat signifikansi pada level $\alpha = 0,05$. Apabila nilai sig yang diperoleh lebih kecil dari derajat signifikansi maka model yang digunakan sudah fix.

3.6.3.3 Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh sebuah variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau $(\alpha) = 0,05$ (5%). Jika nilai t hitung $>$ t tabel dengan signifikansi 0,05, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikan di bawah 0,05.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Variabel penyajian laporan keuangan daerah secara signifikan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah.
2. Variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah secara signifikan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah penyajian laporan keuangan daerah mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah mempengaruhi akuntabilitas keuangan daerah baik secara parsial ataupun secara bersamaan.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu mampu menyajikan laporan keuangan yang disusun secara lengkap.

Untuk Aksesibilitas laporan keuangan daerah, secara keseluruhan pemerintah mampu memberi informasi laporan keuangan bagi para pengguna potensi. Namun, secara parcial masih terdapat kelemahan dalam hal aksesibilitas laporan keuangan pada kabupaten Pringsewu. Dimana menurut masyarakat akses terhadap laporan keuangan kabupaten pringsewu belum terlaksana secara baik. Dan menurut anggota SKPD, keterbatasan akses terhadap laporan keuangan dikarenakan hanya pengguna laporan keuangan tertentu saja yang bisa mengakses laporan keuangan kabupaten pringsewu.

5.2 Saran

Saran-saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian mengingat pentingnya informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan maka pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten Pringsewu harus mampu menyajikan laporan keuangan yang andal, relevan dan lengkap sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta menyediakan akses yang mudah bagi para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui dan mendapatkannya, terutama bagi para pengguna eksternal. Akuntabilitas yang efektif tergantung pada akses publik terhadap laporan keuangan daerah yang dapat dibaca dan dipahami. Untuk mendukung akuntabilitas yang efektif tersebut, pemerintah daerah kabupaten Pringsewu diharapkan dapat mempublikasikan laporan keuangannya melalui media massa, seperti surat kabar, radio, website, dan media lainnya yang

memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah kabupaten Pringsewu terhadap masyarakat. Penyajian laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, memungkinkan kontrol dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan serta semua sumber daya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah bisa berjalan dengan baik. Hal ini akan semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, dengan demikian efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah daerah bisa terlaksana

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) tahun 2013*
- Bandariy, Himmah. 2011. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksestabilitas Laporan Keuangan Terhadap Informasi Keuangan Daerah Pada Kabupaten Banyumas*. . Universitas Diponegoro Semarang.
- Bastian, 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta Erlangga.
- Belkaoui, Ahmed R. 2001. *Teori Akuntansi, Edisi 4, Jilid 2*. Alih Bahasa Mawinta, Hajayanti Widiastuti, Heri Kurniawan, Alia Arisanti. Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Chia, Y.M. 1995. *Decentralization, Management Accounting System Information Characteristic And Their Interaction Effects on Managerial Performance: A Singapore Study*. *Journal of Management Information Systems*. Vol. 12. No. 4. Spring
- Diamond, Jack. 2002. *Performance Budgeting-Is Accrual Accounting Required?*. IMF Working Paper. Fiscal Affairs Department
- Ellwood, Sheila. 1993. *Parish and Town Councils: Financial Accountability and Managemant*, Local Government Studies. VOL 19.
- Ghozali, Imam, 2011. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan program IBM SPSS 19. Edisi 5*, Penerbit Universitas Dipenogoro, Semarang.
- HarianLampung.com* pada tanggal 28 mei 2015
- Henley, D., et.al., 1992. *Public Sector Accounting and Financial Control, Fourth Edition*, Chapman & Hall, London.
- J Hehanussa, Salomi. 2015. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksestabilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparasi dan Akuntanbilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon*. Universitas Kristen Indonesia Maluku.
- Katz, Ellen, 2004, *Transparancy in GovernmentHow American Citizens Influence Public Policy*, *Journal of Accountancy*, Jun 2004

- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga
- Mahsun, Mohamad, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Penerbit BPFE, Yogyakarta
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mulyana, Budi. 2006, *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol.2 No. 1. Mei 2006*
- N, Wahida . 2015. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksestabilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Konawe Utara* . Universitas Hasanuddin Makasar
- Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Osborne, david, and Ted Gaebler, 1992, *Reinventing Government : How Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector*, Reading, Massachusetts : Addisom Wesley Publishing Co. Inc.
- Pongoliu, Fatrisya. 2014. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksestabilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan. Studi Pada DPPKAD Kabupaten Bone Bolango*. Universitas Negeri Gorontalo
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara
- _____. Undang-Undang No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- _____. Undang-Undang No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
- _____. Undang-Undang No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Riduwan. 2005. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

- Rohman, Abdul. 2009. *Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Vol. 9 No. 1. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sande, Peggy. 2013. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Sekaran, Uma (2003), *Research Methods For Business: A Skill Building Approach*, New York-USA: John Wiley and Sons, Inc
- Shende, Suresh dan Tony Bennet. 2004. *Concept Paper 2: Transparency and Accountability in Public Financial Administration*. UN DESA.
- Subaweh, Imam, 2008. Agency Theory dalam Pemerintahan Daerah, [Http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/imas/2008/9/03](http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/imas/2008/9/03).
- Sudjana. 2002. *Metode Statistika*. Tarsito, Bandung
- Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99 Tentang *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, yang telah diperbaharui Keputusan Kepala LAN dengan Nomor :239/IX/6/8/203 Tentang *Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Wilson & Kattelus, “*Accounting For Governmental and Non Profit Entities*” 2002 13th Edition, Irwin, North America.